



LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DAN  
PEMERINTAH KOTA BINJAI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

---

NOMOR : PJ 1532 Tahun 2023

NOMOR : 100.3.7 / 13411 / 2023

NOMOR : 550 / 3446

NOMOR : 100.3.7 / 8144 / 2023

NOMOR : 100.3.7.1 / 10321

TENTANG  
RENCANA KERJA / *WORKING LEVEL AGREEMENT*  
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN/*BUS RAPID TRANSIT*  
DI KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DAN DELI SERDANG

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, DAN PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani pada 12 Januari 2022. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Lampiran Nota Kesepakatan yang berisi Rencana Kerja / *Working Level Agreement* tentang Pengembangan Angkutan massal Berbasis Jalan (*Bus Rapid Transit*) di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Istilah-istilah yang ditulis dengan huruf kapital dalam Rencana Kerja / *Working Level Agreement* ini memiliki makna sebagaimana dijelaskan berikut ini, kecuali jika konteks mensyaratkan sebaliknya:

- a. "Bank" berarti *International Bank for Reconstruction and Development*.
- b. "Perjanjian Pinjaman" berarti perjanjian pinjaman untuk Proyek antara Republik Indonesia dan Bank, tertanggal 29 Juni 2022, sebagaimana perjanjian tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu (Loan Number: 9340-ID).
- c. "Proyek" berarti *Indonesia Mass Transit Project*, yang juga disebut Proyek Implementasi Sistem Transportasi Publik, yang didanai oleh Bank dalam Perjanjian Pinjaman.

(2) PIHAK KESATU mempunyai peran dan tanggung jawab sesuai dengan Tabel Lampiran Perjanjian Rencana Kerja / *Working Level Agreement* dan menyetujui hal-hal sebagai berikut, yang semuanya tidak terpisahkan dari Lampiran Nota Kesepakatan:

- a. Menyediakan sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang mungkin diperlukan bagi PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA dengan tepat waktu, untuk membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan proyek; dan
- b. Menyerahkan infrastruktur BRT yang dibangun di Kawasan Mebidang dalam lingkup Proyek ke PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA, segera setelah selesainya konstruksi, sebagai kontribusi dalam bentuk barang, untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman.

(3) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA berperan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tabel Lampiran Perjanjian Rencana Kerja / *Working Level Agreement* dan menyetujui hal-hal sebagai berikut, yang semuanya tidak terpisahkan dari Lampiran Nota Kesepakatan ini:

- a. Membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan aspek yang relevan dari *Environmental and Social Commitment Plan* ("ESCP") dan instrumen lingkungan dan sosial yang disebutkan di dalamnya, serta ketentuan dalam Manual Pelaksanaan Proyek ;
- b. Membentuk dan menyelenggarakan Unit Pelaksana Proyek Mebidang sesuai dengan Perjanjian Pinjaman;

- c. Berkomitmen dan menyediakan, secara tepat waktu, semua sumber daya keuangan dan lainnya, termasuk dana pendamping yang diperlukan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman), yang diperlukan sesuai dengan WLA yang tercantum dalam Lampiran dan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek;
- d. Memelihara kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memungkinkan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan indikator yang dapat diterima oleh PIHAK KESATU bersama Bank, tentang kemajuan kegiatan Proyek, operasinya, dan pencapaian tujuan Proyek
- e. Memungkinkan PIHAK KESATU bersama Bank untuk memeriksa kegiatan Proyek, operasinya, serta catatan dan dokumen yang relevan;
- f. Menyusun dan memberikan kepada PIHAK KESATU bersama Bank semua informasi yang diminta oleh PIHAK KESATU bersama Bank secara wajar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Proyek jika diperlukan; dan
- g. Melaksanakan rencana Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha, yang merupakan Pengaturan Kemitraan Pemerintah-Swasta (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman) berdasarkan Perjanjian Pinjaman, sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman dan Manual Pelaksanaan Proyek

(4) Kecuali Bank menyetujui, Para Pihak tidak boleh mengalihkan, mengubah, membatalkan atau mengesampingkan Perjanjian Rencana Kerja/*Working Level Agreement* ini atau Nota Kesepahaman, atau ketentuannya, atau mengizinkan entitas atau lembaga yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Proyek untuk melakukannya.

**TABEL LAMPIRAN PERJANJIAN RENCANA KERJA / WORKING LEVEL AGREEMENT**

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
1	Dukungan Pemerintah Daerah	Penerbitan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menerbitkan Peraturan Daerah terkait Kewajiban Pelayanan Transportasi Publik, Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung Angkutan Massal Perkotaan, Pengembangan Sistem NMT, dan Integrasi Moda Transportasi Perkotaan	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan di Kawasan Mebidang	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
2	Dukungan Pemerintah Daerah	Penerbitan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Review/revisi Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Penyesuaian rencana BRT dalam dokumen perencanaan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota)	Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang sudah direvisi yang sudah mengakomodir rencana BRT Mebidang.	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perencanaan dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
3	Dukungan Pemerintah Daerah	Penerbitan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Review/Revisi Peraturan Daerah Perencanaan Daerah (Penyesuaian rencana BRT dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kab/Kota, Renstra OPD Provinsi/Kab/Kota, RKPD dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota)	Peraturan Daerah RPJMD Prov. Sumut dan Kab/Kota Mebidang, Renstra Dishub Prov. Sumut dan Kab/Kota Mebidang, RKPD Prov. Sumut dan Kab/Kota Mebidang, Renstra Dishub Prov. Sumut dan Kab/Kota Mebidang	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
4	Dukungan Pemerintah Daerah	Penerbitan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Menerbitkan Peraturan Gubernur yang Mendukung Operasional BRT (Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung BRT, Kewajiban Pelayanan Transportasi Publik, Penentuan Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Umum Masal Perkotaan (SPM), Penentuan Tarif Layanan Angkutan Umum Masal Perkotaan, Integrasi Antar Moda Transportasi, Penanggulangan Kecelakaan dalam pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal, Pengambilalihan Pengoperasian Armada BRT, dan Penetapan trayek/RUJT)	Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan di Kawasan Mebidang, Pergub tentang RUJT Perkotaan Mebidang Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Angkutan Massal di Sumatera Utara	APBD Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,  Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,
5	Dukungan Pemerintah Daerah	Penerbitan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Menerbitkan peraturan lain (Pembentukan Tim PIU, Proses Bisnis dalam pengoperasian BRT, Penugasan terhadap BUMD/Kelembagaan)	Keputusan Gubernur tentang Tim PIU BRT Mebidang dan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penugasan BUMD Provinsi dan Kab/Kota	APBD Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,
6	Dukungan Pemerintah Daerah	Penerbitan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyiapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan keberlanjutan proyek, seperti manajemen parkir, Transit Oriented Development dan lainnya	Peraturan bersama pembiayaan investasi dan operasi angkutan massal serta kawasan TOD Peraturan bersama perencanaan kawasan TOD dan penerapan LVC dalam penerimaan daerah  Kebijakan dan prosedur proyek, manajemen parkir, Transit Oriented Development dan lainnya	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
7	Dukungan Pemerintah Daerah	Pembentukan kelembagaan pengelola BRT di Kawasan Perkotaan MEBIDANG	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyiapkan regulator untuk mengelola skema imbalan dan sanksi terhadap standar pelayanan minimal transportasi publik, dan sebagai pengawas lembaga pengelola	Skema imbalan dan sanksi	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang,
8	Dukungan Pemerintah Daerah	Pembentukan lembaga pengelola BRT di MEBIDANG	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyusun satu atau lebih lembaga pengelola BRT antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Lembaga Pengelola BRT Mebidang	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
9	Dukungan Pemerintah Daerah	Pembentukan lembaga pengelola BRT di MEBIDANG	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyiapkan verifikator untuk melakukan audit atas penyelenggaraan sistem operasional BRT secara independen	Dokumen audit	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	
10	Dukungan Pemerintah Daerah	Perizinan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyusun dan mengkoordinasikan perizinan terkait operasional BRT, seperti izin trayek dan izin usaha sektor transportasi	Izin trayek dan izin usaha sektor transportasi	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	
11	Dukungan Pemerintah Daerah	Perizinan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyusun dokumen perizinan lainnya (Izin Prinsip dan Pemanfaatan RUMIJA Jalur khusus, IMB Depo, Persetujuan lingkungan Depo, Rekomendasi Andalalin Depo, Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Depo, Persetujuan	Dokumen Perizinan	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				Bangunan Gedung depo, Penetapan Lokasi Depo)				
12	Dukungan Pemerintah Daerah	Lahan untuk depo dan fast-charging untuk bus listrik di beberapa lokasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<p>Memastikan tersedianya lahan untuk depo tambahan dan fast-charging untuk bus listrik di beberapa lokasi</p> <p>Melakukan Survei Dasar (sensus, inventarisasi aset, dan sosial-ekonomi yang merupakan survei dasar terhadap populasi yang terkena dampak). Menyediakan dan melaksanakan pengelolaan dampak sosial akibat pembebasan lahan untuk depo tambahan dan stasiun pengisian bahan bakar sesuai dengan Resettlement Policy Framework (RPF) yang termasuk dalam Environmental and Social Management Framework (ESMF).</p> <p>Memastikan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) dapat diakses dan dijalankan.</p>	Ketersediaan lahan depo dan fast charging	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
13	Dukungan Pemerintah Daerah	Pengelolaan risiko dan dampak sosial, serta ruang terbuka hijau yang digunakan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<p>Membantu PMU dan PIU dalam melakukan penyaringan lingkungan dan sosial (E&amp;S) untuk menentukan risiko dan dampak sosial dan lingkungan, penilaian risiko/dampak sosial dan lingkungan, menyiapkan rencana mitigasi sosial, dan analisis ruang terbuka hijau yang digunakan.</p> <p>Memastikan Mekanisme Penanganan Keluhan dapat diakses dan dijalankan.</p>	Solusi terkait dampak sosial jika ada dan ruang terbuka hijau yang terpakai	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
14	Dukungan Pemerintah Daerah	Lahan untuk pelebaran jalan, pedestrian, untuk penempatan halte jika kurang.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Sesuai kewenangan jalan)	Memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur BRT dengan mengoptimalkan kondisi yang ada.  Melakukan Survei Dasar (sensus, inventarisasi aset, dan survei sosial/sosio-ekonomi) dan mengembangkan langkah-langkah pengelolaan sosial.  Menyiapkan dan melaksanakan rencana pengelolaan dampak sosial, dan dilaporkan, sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (Resettlement Policy Framework)/Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF).  Memastikan Mekanisme Penanganan Pengaduan (Complaint Handling Mechanism) berjalan dengan baik.	Lahan untuk infrastruktur BRT	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara	
15	Dukungan Pemerintah Daerah	Penyiapan dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Operasional BRT Mebidang	Kementerian Perhubungan	Menyiapkan studi terkait Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah	Studi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
16	Dukungan Pemerintah Daerah	Penyiapan dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Operasional BRT Mebidang	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menerapkan kebijakan atau peraturan, penertiban berdasarkan hasil studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLI) di daerah kewenangan masing-masing	kebijakan/peraturan/pe nertiban berdasarkan MRLI Peraturan bersama tentang pengelolaan pendapatan dampak dari penerapan MRLI untuk operasional angkutan massal	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.	
17	Dukungan Pemerintah Daerah	Penyiapan dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Operasional BRT Mebidang	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan uji coba pada tahap pra-operasional, meliputi : koordinasi, pengadaan fasilitas perlengkapan jalan, pelaksanaan MRLI, serta sosialisasi kepada masyarakat. di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing	Uji coba MRLI	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.	
18	Dukungan Pemerintah Daerah	Penyiapan dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Operasional BRT Mebidang	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan Keberlangsungan tahap operasional MRLI di daerah kewenangan masing-masing	Operasional MRLI	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.	
19	Dukungan Pemerintah Daerah	Komitmen Pemberian Dukungan Finansial dan Sumber Daya untuk fase Implementasi dan fase Operational & Maintenance	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyusun dokumen-dokumen komitmen untuk pemberian dukungan finansial dan Sumber Daya untuk fase Implementasi dan fase Operational & Maintenance.  Pembagian dokumen komitmen pemberian dukungan finansial dan sumber daya untuk fase implementasi dan fase operational & maintenance antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Daerah lainnya di Wilayah	Dokumen Komitmen Dukungan Finansial dan Sumber Daya untuk fase Implementasi dan fase Operational & Maintenance	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang dan sumber pendanaan lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				<p>Mebidang (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang) akan terbagi berdasarkan pelayanan rute:</p> <p>a. Pemerintah Kota Medan untuk rute yang merupakan asal/tujuan di dalam Kota Medan dan lingkup pelayanan lebih dari 50% di wilayah Kota Medan.</p> <p>b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk rute yang merupakan asal/tujuan di Kota Binjai dan/atau Kabupaten Deli Serdang, dan lingkup pelayanan kurang dari 50% di wilayah Kota Medan.</p>				
20	Dukungan Pemerintah Daerah	Formulasi pembagian alokasi pembiayaan sistem operasional BRT di antara pemerintah daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyusun formula pembagian alokasi pembiayaan sistem operasional BRT di antara pemerintah daerah	Formula Pembagian Alokasi Dukungan Finansial dan Sumber Daya untuk fase implementasi dan fase operasional	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
21	Dukungan Pemerintah Daerah	Komitmen Pemberian Dukungan Finansial dan Sumber Daya untuk Fase Operational dan Maintenance, pada kondisi realisasi pemasukan dibawah proyeksi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyusun dokumen komitmen untuk pemberian dukungan untuk kondisi defisit (realisasi pemasukan dibawah proyeksi pemasukan)	Dokumen Komitmen Dukungan untuk Fase Operational dan Maintenance, pada kondisi realisasi pemasukan dibawah proyeksi pemasukan	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang	
22	Penyiapan Infrastruktur BRT	Penyiapan Infrastruktur BRT	Kementerian Perhubungan	Menyusun <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) yang memuat pengadaan DED dan supervisi, pekerjaan DED, E&S Mitigation Plans (ESMP, dan Resettlement Action Plan-RAP jika dibutuhkan), <i>Support Bidding Process</i> untuk lelang konstruksi, serta pekerjaan supervisi	Dokumen DED BRT Mebidang	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
23	Penyiapan Infrastruktur BRT	Penyiapan Infrastruktur BRT	Kementerian Perhubungan	Melaksanakan pengerjaan konstruksi sesuai hasil final DED yang telah disepakati dengan pemerintah provinsi / kabupaten kota	Infrastruktur dan Sistem BRT Mebidang	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,  Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
24	Penyiapan Infrastruktur BRT	Penyiapan Infrastruktur BRT	Kementerian Perhubungan	Membentuk sistem ITS ( <i>Intelligent Transportation System</i> ), termasuk pengadaan kontraktor dan pengerjaan ITS.	Sistem ITS BRT Mebidang	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
25	Penyiapan Infrastruktur BRT	Penyiapan Infrastruktur BRT	Kementerian Perhubungan	Memberikan pendampingan teknis <i>dan</i> peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam melaksanakan implementasi proyek pada fase operasional dan pemeliharaan	Terlaksananya Pendampingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
								Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
26	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Penyiapan Lembaga Pengelola BRT	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mempersiapkan rencana bisnis, struktur organisasi beserta uraian tugas dan tanggungjawab, merekrut sumber daya pengelola serta memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas	Lembaga Pengelola BRT Mebidang	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara,
27	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengadaan Bus	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pemerintah Daerah: Menyusun rencana pengadaan bus dan memastikan tersedianya unit bus diesel dan/atau bus listrik.  Pemerintah Pusat: Menyediakan opsi bantuan unit bus listrik dengan jumlah minimum sebesar 30% dari kebutuhan	Unit Bus	APBN/Loan, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
28	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengadaan Operator	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan rangkaian lelang operator, termasuk perekrutan driver dan melakukan training atau capacity building pengemudi bus diesel dan/atau bus listrik	Kontrak Operator	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, BUMD (Lembaga Pengelola)	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
						Kabupaten Deli Serdang		Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
29	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Operasional Bus	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan operasional bus oleh mitra dan pengelola	Operasional Bus	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	BUMD (Lembaga Pengelola)	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
30	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyiapkan dukungan pendanaan dalam bentuk subsidi  Pembagian operasional untuk dukungan pendanaan antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Daerah lainnya di Wilayah Mebidang (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang) akan terbagi berdasarkan pelayanan rute: a. Pemerintah Kota Medan untuk rute yang merupakan asal/tujuan di dalam Kota Medan dan lingkup pelayanan lebih dari 50% di wilayah Kota Medan. b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk rute yang merupakan asal/tujuan di Kota Binjai dan/atau Kabupaten Deli Serdang, dan lingkup	Pendanaan operasional BRT Mebidang	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan	Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,  Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				pelayanan kurang dari 50% di wilayah Kota Medan.				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
31	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyiapkan mekanisme penerimaan dari tarif dan non-tarif	Skema penerimaan tarif dan Non-Tarif	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, BUMD (Lembaga Pengelola)	
32	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyiapkan dan melakukan pengadaan dan kontrak layanan dengan pihak ketiga	Kontrak layanan dengan pihak ketiga	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan, BUMD (Lembaga Pengelola)	
33	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Operasi dan pemeliharaan depo, jalur khusus, <i>charging station</i> , fasilitas pejalan kaki dan halte	Rencana operasi dan pemeliharaan fasilitas BRT	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	BUMD (Lembaga Pengelola)	
34	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Kementerian Perhubungan	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait indikator keberhasilan proyek/ <i>Project Development Objective</i> (PDO) yang tercantum dalam Project Appraisal Document (PAD)	pemantauan dan evaluasi operasional, Inventaris data kecelakaan dan permasalahan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
35	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Membantu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait operasional BRT termasuk inventarisasi data pelanggaran kecelakaan dan permasalahan lainnya	pemantauan dan evaluasi operasional, Inventaris data kecelakaan dan permasalahan	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
36	Penyiapan Operasional dan Pemeliharaan BRT	Pengoperasian dan Pemeliharaan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menyediakan dukungan finansial untuk pelaksanaan operasional BRT pada saat opsen PKB dan BBNKB sudah dilaksanakan	Dukungan finansial	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan,
37	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Angkutan Eksisting	Kementerian Perhubungan	Menyiapkan rencana dan studi <i>re-routing</i> AKDP dan angkot, termasuk strategi mitigasi dampak sosial dari reformasi angkot. Termasuk pelaksanaan kegiatan capacity building	Rencana mitigasi angkutan eksisting	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
38	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Angkutan Eksisting	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Implementasi <i>re-routing</i> AKDP dan angkot, meliputi sosialisasi, pemeliharaan parkir, masa uji coba, pengawasan pelaksanaan	Terlaksananya mitigasi angkutan eksisting	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	<p>Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,</p> <p>Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,</p> <p>Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
								Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
39	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi PKL	Kementerian Perhubungan	Merencanakan studi pemindahan dan/atau penertiban PKL	Rencana mitigasi PKL	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
40	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi PKL	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<p>Penerapan manajemen PKL. Kegiatan utama meliputi: Tahap reparasi: (i) melakukan sensus dan survei sosio-ekonomi untuk mengidentifikasi dampak dan masyarakat yang akan terkena dampak; (ii) melakukan penelitian terhadap dokumen sosial-lingkungan; (iii) mengembangkan rencana mitigasi sosial, livelihood plan; dan (iv) menyiapkan operasi GRM yang dapat diakses di lapangan</p> <p>Tahap implementasi: (i) melaksanakan tindakan dampak sosial/livelihood plan dan pelaporan kepatuhan terhadap pelaksanaannya; (ii) melakukan konsultasi dan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan dan membangun sistem GRM yang kuat untuk penyelesaian keluhan; Dan (iii) Melaksanakan livelihood plan dengan dukungan lembaga terkait</p>	Terlaksananya mitigasi PKL	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polrestabes Medan	<p>Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,</p> <p>Inspektorat Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,</p>
41	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Parkir	Kementerian Perhubungan	Merencanakan studi terkait mitigasi parkir <i>on street</i> di sepanjang sistem BRT	Rencana mitigasi parkir	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	<p>Inspektorat Kota Binjai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Polresta Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan</p>
42	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Parkir	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Implementasi strategi mitigasi parkir <i>on street</i> di sepanjang sistem BRT	Terlaksananya mitigasi parkir	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Kota Medan	<p>Inspektorat Kota Binjai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Polresta Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
43	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Risiko Sosial (selain PKL dan Parkir)	Kementerian Perhubungan	Merencanakan studi terkait mitigasi risiko sosial terkait BRT di luar pedagang kaki lima dan parkir, mencakup: Tahap reparasi: (i) melakukan sensus dan survei sosial ekonomi untuk mengidentifikasi dampak dan orang-orang yang akan terkena dampak; (ii) melakukan pemeriksaan dokumen sosial dan lingkungan; (iii) mengembangkan rencana mitigasi sosial (ESMP).  Tahap implementasi: (i) mengawasi pelaksanaan rencana mitigasi sosial, termasuk pelaporan kepatuhan pelaksanaan sosial. (ii) melakukan konsultasi dan keterlibatan yang berarti dengan para pemangku kepentingan dan membangun sistem GRM yang kuat untuk penyelesaian keluhan.	Rencana mitigasi dampak sosial non PKL dan non Parkir	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,  Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Polres Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
44	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Risiko Sosial (selain PKL dan Parkir)	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Implementasi dampak dan risiko mitigasi sosial lainnya yang terkait dengan BRT	Mitigasi dampak sosial non PKL dan non Parkir	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polrestabes Medan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,
45	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Lingkungan	Kementerian Perhubungan	Merencanakan studi terkait mitigasi dampak lingkungan saat (1) sebelum konstruksi (2) saat konstruksi berlangsung (3) sesudah konstruksi dan operasional	Rencana mitigasi dampak lingkungan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
46	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Lingkungan	Kementerian Perhubungan	Implementasi mitigasi dampak lingkungan saat (1) sebelum konstruksi (2) saat konstruksi berlangsung	Mitigasi dampak lingkungan saat (1) sebelum konstruksi (2) saat konstruksi berlangsung	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
47	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mitigasi Lingkungan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Implementasi mitigasi dampak lingkungan dan pemeliharaan aspek lingkungan saat sesudah konstruksi dan operasional	Mitigasi dampak lingkungan dan pemeliharaan aspek lingkungan saat sesudah konstruksi dan operasional	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
48	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Publikasi	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melakukan kegiatan sosialisasi (penjangkauan masyarakat dan penyebaran informasi) terkait proyek BRT termasuk membuat rencana strategi kampanye, media, dan publikasi	Kampanye dan publikasi proyek	Loan No. 9340-ID, APBD Prov. Sumut dan Kab/Kota Mebidang	Kementerian Perhubungan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
49	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pemahaman ESCP (Environmental Social Commitment Plan) dan ESMF (Envrionmental and Social Management Framework) di semua elemen PMU PIU	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan ketentuan di dalam ESCP (Environmental Social Commitment Plan) dapat dipahami dan dipenuhi sesuai peran dan kewenangan masing-masing	Workshop di awal dan Berkala untuk penjelasan mengenai ESCP	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
50	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelaporan Rutin	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mempersiapkan dan menyampaikan laporan pemantauan rutin kepada Bank mengenai kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS) Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan dan catatan keluhan, serta data yang	Pelaporan Rutin dari Pusat kepada Bank	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, serta informasi tentang dampak lahan/aset/mata pencaharian dan komposisi pekerja.				Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,
51	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelaporan Rutin	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mempersiapkan dan menyampaikan laporan pemantauan rutin kepada Bank mengenai kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS) Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan dan catatan keluhan, serta data yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, serta informasi tentang dampak lahan/aset/mata pencaharian dan komposisi pekerja.	Pelaporan Rutin dari Daerah ke Pusat	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang,
52	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Insiden dan Kecelakaan	Kementerian Perhubungan	Segera memberi tahu Bank tentang setiap insiden atau kecelakaan yang terkait dengan Proyek yang memiliki, atau kemungkinan memiliki, efek buruk yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat yang terkena dampak, publik atau pekerja, sesuai dengan prosedur pelaporan insidendi bawah Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF). Memberikan rincian yang cukup mengenai insiden atau kecelakaan, tanggung jawab kelembagaan, menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan akan diambil untuk mengatasinya, dan	Pelaporan setiap insiden atau kecelakaan kepada Bank	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				setiap informasi yang diberikan oleh kontraktor dan entitas pengawas, sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sesuai permintaan Bank, siapkan laporan tentang insiden atau kecelakaan tersebut dan usulkan tindakan apa pun untuk mencegah terulangnya kembali.				
53	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Struktur Organisasi	Kementerian Perhubungan	Mendirikan dan memelihara Unit Manajemen Proyek (PMU) dengan staf dan sumber daya yang didekisasikan untuk mendukung manajemen risiko dan dampak ESHS Proyek, termasuk setidaknya dua personel sebagai spesialis lingkungan dan sosial yang berkualifikasi dengan setidaknya lima tahun pengalaman profesional yang relevan, untuk tertanam dalam PMU.	Berdiri dan Beroperasinya PMU dengan dilengkapi Personel yang diminta/diperlukan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
54	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Struktur Organisasi	Kementerian Perhubungan	Pembentukan Project Implementation Unit (PIU) di Pusat	Berdiri dan Beroperasinya PIU Pusat dengan dilengkapi Personel yang diminta/diperlukan, termasuk Tenaga Ahli dalam Bidang Sosial dan Lingkungan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
55	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Struktur Organisasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pembentukan dan Operasional Project Implementation Unit (PIU) di Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah Mebidang	Berdiri dan Beroperasinya PIU Pusat dengan dilengkapi Personel yang diminta/diperlukan, termasuk Tenaga Ahli dalam Bidang Sosial dan Lingkungan	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
56	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) untuk BRT di Mebidang, diselesaikan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan.	Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) untuk BRT di Mebidang, diselesaikan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan.	Anggaran yang ada di PMU sebelum Tanggal Efektif, dan Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
57	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) untuk BRT di Mebidang diselesaikan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan.	Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) untuk BRT di Mebidang, diselesaikan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan.	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
58	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<i>Memastikan bahwa Rencana Manajemen Lalu Lintas (TMP) untuk BRT Mebidang disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan, dilaksanakan sesuai dengan ESIA awal. Tender TMP merupakan bagian dari Komponen 2.</i>	Rencana Manajemen Lalu Lintas (TMP) untuk BRT Mebidang disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan, dilaksanakan sesuai dengan ESIA awal.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,
59	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<i>Memastikan bahwa Rencana Manajemen Lalu Lintas (TMP) untuk BRT Mebidang disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan, dilaksanakan sesuai dengan ESIA awal. Tender TMP merupakan bagian dari Komponen 2.</i>	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan,, sosialisasi, implementasi dan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
60	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<i>Memastikan bahwa Kontraktor - Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial(C-ESMPs) disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan dan diimplementasikan, sejalan dengan ESIA's akhir dan langkah-langkah yang ditentukan dalam ESCP ini. Anggaran untuk C-ESMP harus dimasukkan dalam dokumen kontrak .</i>	Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial(C-ESMPs) disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan dan diimplementasikan, sejalan dengan ESIA's akhir dan langkah-langkah yang ditentukan dalam ESCP ini. Anggaran untuk C-ESMP harus dimasukkan dalam dokumen kontrak .	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,  Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai,
61	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<i>Memastikan bahwa Kontraktor - Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial(C-ESMPs) disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan dan diimplementasikan, sejalan dengan ESIA's akhir dan langkah-langkah yang ditentukan dalam ESCP ini. Anggaran untuk C-ESMP harus dimasukkan dalam dokumen kontrak .</i>	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan,, sosialisasi, dan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,
62	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<i>Memastikan kepatuhan terhadap ESMF, termasuk persyaratan ESMF untuk penyiapan, pengungkapan, konsultasi dan pelaksanaan instrumen analisis lingkungan dan sosial : Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Resettlement Action Plan (RAP)/social impact management plan, serta pengelolaan lingkungan dan sosial rencana dan instrumen lain berdasarkan ESIA, yang</i>	Kepatuhan terhadap ESMF terpenuhi secara keseluruhan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				<i>konsisten dengan ESS 1 hingga ESS 10.</i>				Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
63	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<i>Memastikan kepatuhan terhadap ESMF, termasuk persyaratan ESMF untuk penyaringan dan persiapan, pengungkapan, konsultasi dan pelaksanaan instrumen analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial : Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta pengelolaan lingkungan dan sosial rencana dan instrumen lain berdasarkan ESIA, yang konsisten dengan ESS 1 hingga ESS 10.</i>	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, sosialisasi, implementasi dan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
64	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan rencana pemulihan mata pencaharian bagi pengemudi angkot di BRT Mebidang sesuai dengan ESMF awal.	Pemulihan mata pencaharian bagi pengemudi angkot di BRT Mebidang sesuai dengan ESMF awal.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
65	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melakukan survei sosial ekonomi kepada penduduk yang terkena dampak (misalnya, pedagang kaki lima / penjual di pasar tumpah). Memastikan bahwa rencana pemulihan mata pencaharian	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, sosialisasi, implementasi	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				bagi pengemudi angkot di BRT Mebidang sesuai dengan ESMF awal.	si dan pengawasan di daerah masing-masing	Kabupaten Deli Serdang		
66	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Kerangka Acuan (ToR) dan output kegiatan bantuan teknis (TA) berdasarkan Komponen 1 harus disusun dan diajukan untuk tidak ada keberatan dari Bank untuk memastikan bahwa saran dan dukungan yang diberikan konsisten dengan ESS yang relevan.	Tersedianya ToR dan output kegiatan bantuan teknis	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
67	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Izin dan Otorisasi Lingkungan	Kementerian Perhubungan	Berdasarkan Komponen 1 dan 2, dapatkan persetujuan lingkungan yang relevan dan/atau perbarui izin yang ada bersama dengan Persyaratan Pemerintah seperti Peraturan No.22 Tahun 2021, AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL (Environmental Management and Monitoring Statement from project proponent/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) jika relevan. Persetujuan lingkungan di atas harus tunduk pada uji tuntas Bank , atas dasar di mana Bank dapat meminta lembaga pelaksana untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan dan / atau pengisian kesenjangan untuk sepenuhnya mengatasi ketentuan-ketentuan utama berdasarkan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) yang berlaku.	Didapatkannya Persetujuan terkait lingkungan dan terpenuhinya Persyaratan terkait lingkungan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,  Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
68	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Izin dan Otorisasi Lingkungan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Berdasarkan Komponen 1 dan 2, dapatkan persetujuan lingkungan yang relevan dan/atau perbarui izin yang ada bersama dengan Persyaratan Pemerintah seperti Peraturan No.22 Tahun 2021, AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL (Environmental Management and Monitoring Statement from project proponent/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) jika relevan. Persetujuan lingkungan di atas harus tunduk pada uji tuntas Bank , atas dasar di mana Bank dapat meminta lembaga pelaksana untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan dan / atau pengisian kesenjangan untuk sepenuhnya mengatasi ketentuan-ketentuan utama berdasarkan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) yang berlaku.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan,, sosialisasi, implementasi dan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,  Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,  Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang,
69	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pemantauan Pihak Ketiga	Kementerian Perhubungan	Mempersiapkan dan menggabungkan aspek yang relevan dari ESS dan ESCP, termasuk aspek yang relevan dari ESIA awal, ke dalam Kerangka Acuan (ToR) untuk audit E&S independen untuk Komponen 2, yang menunjukkan ruang lingkup, waktu, proses pelaporan dan loop umpan balik dan pelatihan. Setelah itu memastikan bahwa pendekatan dan output dari konsultan bekerja sesuai dengan ToR.	Tersediannya TOR sesuai dengan ESS ESCP ESIA untuk audit independen, dan memastikan konsultan bekerja sesuai TOR tersebut	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
70	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pemantauan Pihak Ketiga	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mempersiapkan dan menggabungkan aspek yang relevan dari ESS dan ESCP, termasuk aspek yang relevan dari ESIA awal, ke dalam Kerangka Acuan (ToR) untuk audit E&S independen untuk Komponen 2, yang menunjukkan ruang lingkup, waktu, proses pelaporan dan loop umpan balik dan pelatihan. Setelah itu memastikan bahwa pendekatan dan output dari konsultan bekerja sesuai dengan ToR.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
71	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Prosedur Manajemen Tenaga Kerja	Kementerian Perhubungan	Menerapkan Labor Management Procedure (LMP).	Memastikan Labor Management Procedure (LMP) dilaksanakan sesuai dengan C-ESMP	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
72	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Prosedur Manajemen Tenaga Kerja	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menerapkan Labor Management Plan (LMP).	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara	
73	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan (GRM) untuk Pekerja Proyek	Kementerian Perhubungan	Sebagai bagian dari LMP, menetapkan, memelihara, dan mengimplementasikan GRM untuk Pekerja Proyek.	Memastikan Kontraktor memahami dan melaksanakan GRM	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
74	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan (GRM) untuk Pekerja Proyek	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Sebagai bagian dari LMP, menetapkan, memelihara, dan mengimplementasikan GRM untuk Pekerja Proyek.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
75	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Langkah-Langkah OHS	Kementerian Perhubungan	Melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan, berdasarkan hasilnya, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah okupasi, kesehatan dan keselamatan kerja (OHS) untuk Pekerja Proyek sesuai dengan ESS2 dan persyaratan hukum Pemerintah Indonesia (UU No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pekerjaan Umum dan Penyelesaian No.5 Tahun 2015) dan mengintegrasikannya bersama dengan anggaran dalam dokumen penawaran.	Teridentifikasinya Bahaya dan penilaian resiko, dann memastikan OHS terlaksana, terintegrasi dengan anggaran dalam dokumen penawaran	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
76	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Langkah-Langkah OHS	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan, berdasarkan hasilnya, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah okupasi, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk Pekerja Proyek sesuai dengan ESS2 dan persyaratan hukum Pemerintah Indonesia (UU No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pekerjaan Umum dan Penyelesaian No.5 Tahun 2015) dan mengintegrasikannya bersama dengan anggaran dalam dokumen penawaran.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	
77	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Langkah-Langkah OHS	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara teratur atau setelah insiden signifikan (sebagaimana didefinisikan dalam C-ESMP) untuk memperbarui rencana K3, untuk disertifikasi oleh konsultan pengawasan .	Memastikan Rencana K3 diperbaharui, untuk disertifikasi oleh Konsultan Pengawasan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
78	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Langkah-Langkah OHS	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara teratur atau setelah insiden signifikan (sebagaimana didefinisikan dalam C-ESMP) untuk memperbarui rencana K3, untuk disertifikasi oleh konsultan pengawasan .	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	
79	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan berdasarkan Komponen 1 dan 2 untuk masa konstruksi dan tahap operasi. Pastikan pekerja dan kontraktor dilatih dan implementasikan sesuai rencana jika relevan. Anggaran harus dimasukkan dalam kontrak document.	Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan berdasarkan Komponen 1 dan 2 untuk masa konstruksi dan tahap operasi. Pastikan pekerja dan kontraktor dilatih dan implementasikan sesuai rencana jika relevan. Anggaran harus dimasukkan dalam kontrak document.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,  Inspektorat Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
80	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat disiapkan, diungkapkan, dikonsultasikan dan dilaksanakan berdasarkan Komponen 1 dan 2 untuk masa konstruksi dan tahap operasi. Pastikan pekerja dan kontraktor dilatih dan implementasikan sesuai rencana jika relevan. Anggaran harus dimasukkan dalam kontrak document.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polrestabes Medan.	<p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,</p> <p>Inspektorat Kota Binjai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Polresta Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,</p> <p>Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Polres Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
								<p>Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang,  Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang,  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang</p>
81	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan Pekerja Proyek	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa Pekerja Proyek dilatih untuk meningkatkan kesadaran akan risiko K3 serta risiko keselamatan masyarakat dan kesehatan untuk mengurangi dampak pada masyarakat setempat. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	Pekerja Proyek dilatih untuk meningkatkan kesadaran akan risiko OHS serta risiko keselamatan masyarakat dan kesehatan untuk mengurangi dampak pada masyarakat setempat. Anggaran	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	<p>Inspektorat Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara,</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
					harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
82	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan Pekerja Proyek	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa Pekerja Proyek dilatih untuk meningkatkan kesadaran akan risiko K3 serta risiko keselamatan masyarakat dan kesehatan untuk mengurangi dampak pada masyarakat setempat. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
83	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Ekstraksi Material dan Lisensi Fasilitas Tambahan (Misalkan Lisensi Tambang, Basecamp)	Kementerian Perhubungan	Memastikan bahwa ekstraksi material untuk konstruksi memenuhi persyaratan ESHS Bank Dunia dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Selain itu, pengoperasian tambang dan basecamp akan membutuhkan lisensi lingkungan yang terpisah, yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah daerah (misalnya Dinas Lingkungan Hidup).	Memastikan terpenuhinya persyaratan ESHS Bank Dunia dan Peraturan Pemerintah Indonesia, serta lisensi lainnya yang dibutuhkan.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
84	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Ekstraksi Material dan Lisensi Fasilitas Tambahan (Misalkan Lisensi Tambang, Basecamp)	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa ekstraksi material untuk konstruksi memenuhi persyaratan ESHS Bank Dunia dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Selain itu, pengoperasian tambang dan basecamp akan membutuhkan lisensi lingkungan yang terpisah, yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah daerah (misalnya Dinas Lingkungan Hidup).	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai,

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
85	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya	Kementerian Perhubungan	Sebagai bagian dari studi ESIA dan sesuai dengan ESS 3 dan peraturan Pemerintah Indonesia No.22 tahun 2021, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah dan prosedur untuk pengelolaan limbah dan bahan berbahaya selama pembongkaran, termasuk kegiatan pembongkaran dan pembuangan serta operasi base camp. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah dan prosedur untuk pengelolaan limbah dan bahan berbahaya selama pembongkaran, termasuk kegiatan pembongkaran dan pembuangan serta operasi base camp. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,  Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang,
86	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Sebagai bagian dari studi ESIA dan sesuai dengan ESS 3 dan peraturan Pemerintah Indonesia No.22 tahun 2021, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah dan prosedur untuk pengelolaan limbah dan bahan berbahaya selama pembongkaran, termasuk kegiatan pembongkaran dan pembuangan serta operasi base camp. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
87	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan	Kementerian Perhubungan	Dalam konsultasi dengan masyarakat lokal / komunitas yang tinggal di dekat lokasi konstruksi, mengembangkan dan menerapkan manajemen keselamatan jalan / langkah-langkah manajemen lalu lintas sebagai bagian dari ESMP. Kontraktor harus mengembangkan rencana manajemen lalu lintas sebagai bagian dari rencana spesifik lokasi / C-ESMP untuk mengatasi dampak pada masyarakat lokal dari pemindahan peralatan	mengembangkan dan menerapkan manajemen keselamatan jalan / langkah-langkah manajemen lalu lintas sebagai bagian dari ESMP. Kontraktor harus mengembangkan rencana manajemen lalu lintas sebagai bagian dari rencana spesifik lokasi / C-ESMP untuk mengatasi dampak	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
				konstruksi dan pengangkutan pekerja ke lokasi.	pada masyarakat lokal dari pemindahan peralatan konstruksi dan pengangkutan pekerja ke lokasi.			
88	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Dalam konsultasi dengan masyarakat lokal / komunitas yang tinggal di dekat lokasi konstruksi, mengembangkan dan menerapkan manajemen keselamatan jalan / langkah-langkah manajemen lalu lintas sebagai bagian dari ESMP. Kontraktor harus mengembangkan rencana manajemen lalu lintas sebagai bagian dari rencana spesifik lokasi / C-ESMP untuk mengatasi dampak pada masyarakat lokal dari pemindahan peralatan konstruksi dan pengangkutan pekerja ke lokasi.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
89	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Kementerian Perhubungan	Mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen kebisingan dan getaran untuk mengurangi gangguan masyarakat lokal di ESMP dan dalam kasus konstruksi oleh kontraktor, C-ESMP. Rencana tersebut akan membutuhkan lalu lintas setelah jam kerja dan akhir pekan yang terbatas dan kegiatan lainnya, memancarkan kebisingan dan getaran yang dapat mempengaruhi masyarakat. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	manajemen kebisingan dan getaran untuk mengurangi gangguan masyarakat lokal di ESMP dan dalam kasus konstruksi oleh kontraktor, C-ESMP	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
90	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen kebisingan dan getaran untuk mengurangi gangguan masyarakat lokal di ESMP dan dalam kasus konstruksi oleh kontraktor, C-ESMP. Rencana tersebut akan membutuhkan lalu lintas setelah jam kerja dan akhir pekan yang terbatas dan kegiatan lainnya, memancarkan kebisingan dan getaran yang dapat mempengaruhi masyarakat. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
91	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Kementerian Perhubungan	Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah manajemen kualitas udara sesuai dengan ESMP untuk meminimalkan emisi debu dan gas buronan selama fase konstruksi dan operasi. Tindakan mitigasi oleh kontraktor meliputi penggunaan masker untuk pekerja dan menutupi dump truck dengan terpal, membersihkan ban kendaraan pengangkut material sebelum keluar dari base camp dan menggunakan kendaraan untuk mengangkut material dan peralatan yang telah lulus uji emisi. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak. Selama tahap operasi, kendaraan harus dipertahankan untuk memastikan armada memenuhi standar Euro 4.	manajemen kualitas udara sesuai dengan ESMP untuk meminimalkan emisi debu dan gas buronan selama fase konstruksi dan operasi	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
92	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah manajemen kualitas udara sesuai dengan ESMP untuk meminimalkan emisi debu dan gas buangan selama fase konstruksi dan operasi. Tindakan mitigasi oleh kontraktor meliputi penggunaan masker untuk pekerja dan menutupi dump truck dengan terpal, membersihkan ban kendaraan pengangkut material sebelum keluar dari base camp dan menggunakan kendaraan untuk mengangkut material dan peralatan yang telah lulus uji emisi. Anggaran harus dimasukkan dalam dokumen kontrak. Selama tahap operasi, kendaraan harus dipertahankan untuk memastikan armada memenuhi standar Euro 4.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
93	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Kementerian Perhubungan	Sehubungan dengan pembangunan koridor BRT dan keselamatan pejalan kaki, menyediakan akses dan fasilitas sementara untuk mengurangi dampak dan untuk memfasilitasi akses oleh pejalan kaki, publik dan pemilik toko dan memberikan rambu-rambu yang menginformasikan kepada publik dan pengendara tentang tindakan pencegahan keselamatan, dan skema rerouting	Membantu menyediakan akses dan fasilitas sementara untuk mengurangi dampak dan untuk memfasilitasi akses oleh pejalan kaki, publik dan pemilik toko dan memberikan rambu-rambu yang menginformasikan kepada publik dan pengendara tentang tindakan pencegahan keselamatan, dan skema rerouting	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
94	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Sehubungan dengan pembangunan koridor BRT dan keselamatan pejalan kaki, menyediakan akses dan fasilitas sementara untuk mengurangi dampak dan untuk memfasilitasi akses oleh pejalan kaki, publik dan pemilik toko dan memberikan rambu-rambu yang menginformasikan kepada publik dan pengendara tentang tindakan pencegahan keselamatan , dan skema rerouting	Menyediakan akses dan fasilitas sementara untuk mengurangi dampak dan untuk memfasilitasi akses oleh pejalan kaki, publik dan pemilik toko dan memberikan rambu-rambu yang menginformasikan kepada publik dan pengendara tentang tindakan pencegahan keselamatan , dan skema rerouting	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	
95	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Kementerian Perhubungan	Sehubungan dengan pembangunan koridor BRT, memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan area parkir alternatif yang dekat dengan operator parkir jalanan yang ada dan prioritas untuk parkir jangka pendek dan menyediakan tempat alternatif bisnis, kemitraan pemerintah dan pedagang kaki lima.	membantu, memfasilitasi dan memastikan pemerintah daerah menyediakan area parkir alternatif yang dekat dengan operator parkir jalanan yang ada dan prioritas untuk parkir jangka pendek dan menyediakan tempat alternatif bisnis, kemitraan pemerintah dan pedagang kaki lima.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
96	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Sehubungan dengan pembangunan koridor BRT, memastikan bahwa pemerintah daerah menyediakan area parkir alternatif yang dekat dengan operator parkir jalanan yang ada dan prioritas untuk parkir jangka pendek dan menyediakan tempat alternatif bisnis, kemitraan pemerintah dan pedagang kaki lima.	menyediakan area parkir alternatif yang dekat dengan operator parkir jalanan yang ada dan prioritas untuk parkir jangka pendek dan menyediakan tempat alternatif bisnis, kemitraan pemerintah dan pedagang kaki lima.	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
97	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Kementerian Perhubungan	Memastikan bahwa langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak tertentu kepada masyarakat yang timbul dari kegiatan Proyek, termasuk dalam kaitannya dengan Pekerja Proyek dan setiap risiko masuknya tenaga kerja, dikembangkan dan dilaksanakan	langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak tertentu kepada masyarakat yang timbul dari kegiatan Proyek, termasuk dalam kaitannya dengan Pekerja Proyek dan setiap risiko masuknya tenaga kerja, dikembangkan dan dilaksanakan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
98	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memastikan bahwa langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak tertentu kepada masyarakat yang timbul dari kegiatan Proyek, termasuk dalam kaitannya dengan Pekerja Proyek dan setiap risiko masuknya tenaga kerja, dikembangkan dan dilaksanakan	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	
99	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Libatkan pakar independen untuk meninjau desain, dan disesuaikan dalam desain dan ESMF.	Pakar independen meninjau desain, dan disesuaikan dalam desain dan ESMF.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
100	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Libatkan pakar independen untuk meninjau desain, dan disesuaikan dalam desain dan ESMF.	Membantu mengkoordinasikan untuk memberikan input (masukan) pada penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
101	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	<i>Gender Based Violence (GBV) DAN RISIKO SEA/SH</i>	Kementerian Perhubungan	Melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko dan dampak Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment (SEA/SH) sebagaimana ditetapkan dalam Labor Management Procedure (LMP) dan GBV (SEA/SH) action plan untuk BRT Mebidang	Terlaksananya langkah-langkah dan tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko dan dampak SEA/SH sebagaimana ditetapkan dalam LMP dan GBV (SEA/SH) action plan untuk BRT Mebidang	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	<p>Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,</p> <p>Inspektorat Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan,</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
102	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	<i>Gender Based Violence (GBV) DAN RISIKO SEA/SH</i>	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk mencegah dan memitigasi risiko dan dampak SEA/SH sebagaimana ditetapkan dalam LMP dan GBV (SEA/SH) action plan untuk BRT Mebidang	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Polresta Medan.	<p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,</p> <p>Inspektorat Kota Binjai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Polresta Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,</p> <p>Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Polres Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
								<p>Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang,  Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang,  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang,  Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang</p>
103	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Langkah-Langkah Tanggap Darurat	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi peristiwa darurat selama fase konstruksi dan operasi BRT berkoordinasi dengan langkah-langkah yang relevan	Diterapkannya langkah-langkah untuk mengatasi peristiwa darurat selama fase konstruksi dan operasi BRT berkoordinasi dengan langkah-langkah yang relevan	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	<p>Inspektorat Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara,</p>

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
104	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Langkah-Langkah Tanggap Darurat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi peristiwa darurat selama fase konstruksi dan operasi BRT berkoordinasi dengan langkah-langkah yang relevan	Membantu mengkoordinasikan untuk memberikan input (masukan) pada penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,
105	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Sosialisasi Proyek kepada Masyarakat	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang risiko proyek dan langkah-langkah mitigasi, termasuk mengenai prosedur Grievance Redress Mechanism (GRM) yang tersedia bagi mereka.	Melaksanakan penjangkauan publik dan penyebaran informasi di area proyek.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
106	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Sosialisasi Proyek kepada Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang risiko proyek dan langkah-langkah mitigasi, termasuk mengenai prosedur Grievance Redress Mechanism (GRM) yang tersedia bagi mereka.	Mendukung Pelaksanaan Sosialisasi, Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	Inspektorat Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan,
107	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mematangkan, mengungkapkan, mengkonsultasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) berdasarkan jalur akhir BRT Mebidang, sesuai dengan ESS5 dan Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF) yang termasuk dalam ESMF. LARAP akhir harus sesuai persetujuan Bank Dunia. LARAP perlu dilaksanakan sebelum pengambilalihan lahan dan dimulainya pekerjaan sipil.	Mematangkan, mengungkapkan, mengkonsultasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP), sebelum pembebasan lahan dan dimulainya pekerjaan sipil.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	Inspektorat Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
108	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mematangkan, mengungkapkan, mengkonsultasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) berdasarkan jalur akhir BRT Mebidang, sesuai dengan ESS5 dan Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF) yang termasuk dalam ESMF. LARAP akhir harus sesuai persetujuan Bank Dunia. LARAP perlu dilaksanakan sebelum pengambilalihan lahan dan dimulainya pekerjaan sipil.	Membantu mengkoordinasikan untuk input (masukan) pada penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing. Melaksanakan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP), sebelum pembebasan lahan dan dimulainya pekerjaan sipil.	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	<p>Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Binjai, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai,</p> <p>Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang</p>
109	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pemantauan dan Pelaporan	Kementerian Perhubungan	Menunjuk pemantau independen yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan pengadaan tanah (termasuk pengalihan aset antar badan pemerintah sehubungan dengan penggunaan/ kepemilikan tanah). Memastikan bahwa pemantauan dan pelaporan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian dari pelaporan rutin.	Adanya pemantau independen yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan pengadaan tanah (termasuk pengalihan aset antar badan pemerintah sehubungan dengan penggunaan/ kepemilikan tanah). Memastikan bahwa pemantauan dan pelaporan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian dari pelaporan rutin.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
110	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pemantauan dan Pelaporan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menunjuk pemantau independen yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan pengadaan tanah (termasuk pengalihan aset antar badan pemerintah sehubungan dengan penggunaan/ kepemilikan tanah). Memastikan bahwa pemantauan dan pelaporan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian dari pelaporan rutin.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
111	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Risiko dan Dampak Keanekaragaman Hayati	Kementerian Perhubungan	Sebagaimana diatur dalam <i>Environmental and Social Standard</i> (ESS6), menerapkan prosedur penyaringan yang dikembangkan seperti Penilaian dan pengelolaan dampak terhadap keanekaragaman hayati dan habitatnya berdasarkan hierarki mitigasi ESS6, Penilaian kondisi habitat di lokasi Proyek; Habitat yang dimodifikasi, habitat alami dan habitat kritis, Penilaian dan pengelolaan habitat invasif untuk mengurangi risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang dihasilkan dari infrastruktur yang diusulkan dan pedoman untuk bahan yang bertanggung jawab (misalnya) sumber kayu sesuai dengan ESS6 dan kerangka hukum Pemerintah Indonesia.	Memastikan dan melaksanakan ESS6	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
112	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Risiko dan Dampak Keanekaragaman Hayati	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Sebagaimana diatur dalam <i>Environmental and Social Standard</i> (ESS6), menerapkan prosedur penyaringan yang dikembangkan seperti Penilaian dan pengelolaan dampak terhadap keanekaragaman hayati dan habitatnya berdasarkan hierarki mitigasi ESS6, Penilaian kondisi habitat di lokasi Proyek; Habitat yang dimodifikasi, habitat alami dan habitat kritis, Penilaian dan pengelolaan habitat invasif untuk mengurangi risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang dihasilkan dari infrastruktur yang diusulkan dan pedoman untuk bahan yang bertanggung jawab (misalnya) sumber kayu sesuai dengan ESS6 dan kerangka hukum Pemerintah Indonesia.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
113	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Masyarakat Adat	Kementerian Perhubungan	Melakukan penyaringan, menilai, dan memitigasi potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat sebagai bagian dari penilaian <i>Environmental and Social</i> (E&S) untuk subproyek yang diusulkan di masa depan sesuai dengan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat <i>Indigenous People Planning Framework</i> (IPPF) yang disediakan dalam <i>Environmental Social Management Framework</i> (ESMF).	Melakukan penyaringan, menilai, dan memitigasi potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat sebagai bagian dari penilaian <i>Environmental and Social</i> (E&S) untuk subproyek yang diusulkan di masa depan sesuai dengan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) yang disediakan dalam ESMF.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
114	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Masyarakat Adat	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melakukan penyaringan, menilai, dan memitigasi potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat sebagai bagian dari penilaian E&S untuk subproyek yang diusulkan di masa depan sesuai dengan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) yang disediakan dalam ESMF.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
115	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Temuan Warisan / Cagar Budaya	Kementerian Perhubungan	Mengelola risiko warisan budaya / melindungi warisan budaya dari dampak buruk kegiatan proyek sesuai dengan ESMF dan ESMP. Terapkan langkah-langkah mitigasi untuk pelestarian artefak arkeologi. selama desain stasiun pengguna / pejalan kaki dan trotoar, menghindari bangunan dan situs bersejarah, dan untuk sementara menangguhkan semua kegiatan jika sisa-sisa arkeologi dan budaya ditemukan di lokasi. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Mitigasi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2012 tentang Pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Lingkungan Hidup.	Mengelola risiko Cagar Budaya sesuai dengan ESMF dan ESMP, menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk pelestarian artefak arkeologi	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
116	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Temuan Warisan / Cagar Budaya	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Menerapkan risiko warisan budaya sesuai dengan ESMF dan ESMP. Menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk pelestarian artefak arkeologi selama desain stasiun pengguna / pejalan kaki dan trotoar, menghindari bangunan dan situs bersejarah, dan untuk sementara menanggukkan semua kegiatan jika sisa-sisa arkeologi dan budaya ditemukan di situs. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Mitigasi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2012 tentang Pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Lingkungan Hidup.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
117	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Implementasi SEP	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), termasuk penyebaran informasi dan konsultasi mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat, dan pelatihan Pekerja Proyek dan masyarakat.	Melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), termasuk penyebaran informasi dan konsultasi mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat, dan pelatihan Pekerja Proyek dan masyarakat.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
118	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Implementasi SEP	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), termasuk penyebaran informasi dan konsultasi mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat, dan pelatihan Pekerja Proyek dan masyarakat.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
119	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Implementasi GRM	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mempersiapkan, mengadopsi, memelihara, dan menerapkan mekanisme penyelesaian keluhan (GRM), seperti yang dijelaskan dalam SEP.	Mempersiapkan, mengadopsi, memelihara, dan menerapkan mekanisme penyelesaian keluhan (GRM), seperti yang dijelaskan dalam SEP.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
120	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Implementasi GRM	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mempersiapkan, mengadopsi, memelihara, dan menerapkan mekanisme penyelesaian keluhan (GRM), seperti yang dijelaskan dalam SEP.	Membantu memberikan input (masukan) untuk penyusunan dan cara pelaksanaan, dan melaksanakan pengawasan di daerah masing-masing	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Medan	
121	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan tentang ESS Bank yang relevan dengan Proyek.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
122	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Panduan teknis pengadaan hijau di sektor transportasi.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
123	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Panduan teknis pengadaan hijau di sektor transportasi.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
124	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan tentang mekanisme pengaduan.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
125	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan pemantauan dan analisis data.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
126	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan	Pelatihan tentang kode praktik lingkungan dan sosial serta pedoman untuk pengadaan hijau untuk perusahaan konstruksi.	Mengadakan Pelatihan tentang kode praktik lingkungan dan sosial serta pedoman untuk pengadaan hijau untuk perusahaan konstruksi.	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
127	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan tentang inisiatif penghijauan di transportasi umum.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
128	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Lokakarya inisiasi pembentukan sistem pemantauan dan satuan tugas pemantauan bagi lembaga regional untuk mensurvei sistem transportasi massal yang cepat.	Mengadakan Pelatihan dengan Peserta dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara berkala	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
129	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan gender.	Mengadakan Pelatihan Gender	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
130	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan tentang Stock Valuation	Mengadakan Pelatihan Stock Valuation	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
131	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Pelatihan pemantauan emisi GRK, udara, dan polusi suara	Pelatihan pemantauan emisi GRK, udara, dan polusi suara	Loan No. 9340-ID	Kementerian Perhubungan	
132	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Memberikan masukan ada penyusunan semua dokumen terkait ESCP dan implementasinya	Memberikan masukan ada penyusunan semua dokumen terkait ESCP dan implementasinya	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	
133	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mengadopsi kebijakan berdasarkan hasil studi dan rekomendasi di dalam ESCP	Mengadopsi kebijakan berdasarkan hasil studi dan rekomendasi di dalam ESCP	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT	SUMBER ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			KEMENTERIAN/ PROV/KAB/KOTA	KEGIATAN				
134	Pengaturan Strategi Mitigasi Pengembangan BRT	Pelatihan	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Mengimplementasikan ESCP sesuai dengan wilayah administratif masing-masing, kecuali yang menjadi porsi kontraktor dan konsultan, maka perannya bersifat mendukung dan memonitor implementasi yang dilakukan kontraktor dan konsultan	Mengimplementasikan ESCP sesuai dengan wilayah administratif masing-masing, kecuali yang menjadi porsi kontraktor dan konsultan, maka perannya bersifat mendukung dan memonitor implementasi yang dilakukan kontraktor dan konsultan	APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kota Medan, APBD Kota Binjai, APBD Kabupaten Deli Serdang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	

Demikian lampiran Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-10-2023) di Medan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Tentang Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang.

**PIHAK KEDUA**



**HASSANUDIN**

**PIHAK KESATU**



**HENDRO SUGIATNO**

**PIHAK KETIGA**



**MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION**

**PIHAK KEEMPAT**



**AMIR HAMZAH**

**PIHAK KELIMA**



**ALI YUSUF SIREGAR**